



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI
POLITIK DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

***JURIDICIAL STUDY ON SIMPLIFYING THE NUMBER OF
POLITICAL PARTIES IN ORDER TO STRENGTHENING
PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM***

**CAKRA PERMATA OKTAVIANUS
NIM. 060710191069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI
POLITIK DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

*JURIDICIAL STUDY ON SIMPLIFYING THE NUMBER OF
POLITICAL PARTIES IN ORDER TO STRENGTHENING
PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM*

CAKRA PERMATA OKTAVIANUS
NIM. 060710191069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Membahas waktu yang telah Anda buang
adalah buang-buang waktu¹

¹ Anonim dalam Jangan mau jadi paku, jadilah palu!. 2007, Jakarta, Harvest Private Publishing, hlm 80

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cakra Permata Octavianus

NIM : 060710191069

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Januari 2013

Yang menyatakan

CAKRA PERMATA OCTAVIANUS
NIM. 060710191069

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jack J Octavianus, S.H.,M.H. Ibunda Sal S Octavianus yang memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta motivasi dalam menjalani kehidupan ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen pengajar yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;

**KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI
POLITIK DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

*JURIDICIAL STUDY ON SIMPLIFYING THE NUMBER OF
POLITICAL PARTIES IN ORDER TO STRENGTHENING
PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM*

CAKRA PERMATA OKTAVIANUS
NIM. 060710191069

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 JANUARI 2013**

Oleh :
Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H., M.H
NIP. 196112021988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK
DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PEMERINAHAN
PRESIDENSIAL**

**JURIDICIAL STUDY ON SIMPLIFYING THE NUMBER OF POLITICAL
PARTIES IN ORDER TO STRENGTHENING PRESIDENTIAL
GOVERNMENT SYSTEM**

Oleh :

CAKRA PERMATA OKTAVIANUS
NIM. 060710191069

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

IWAN RACHMAD S, S.H.,M.H.

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

.....

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul berjudul “KAJIAN YURIDIS PENYEDERHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PENGUATAN SISTEM PEMERINAHAN PRESIDENSIAL ”

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M. selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

7. Keluarga besar dan saudara-saudara dari penulis: Kakak Hendro J Octavianus, S.H. ; dr. Rendy Presly Octavianus, Cokro Permata Octavianus, Putri Graisy Melani Octavianus, Salmy, Winda, Edwin, Mbak Nana, Mbak Ema, Vivi;
8. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2006 baik Reguler maupun Non-Reguler, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
9. Rekan-rekan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Pandu Martin S.H., Vina Susanti S.H., Hendra Gani S.H. ,Rindu Ria S.H., Mihwar, Maya, Akbar, Alif, Qoyim S.H, Mas Zaki S.H, Maz Haris S.H, Mas Panggayuh S.H, Mbak Ika Soraya S.H, Aida S.H, Destian S.H, Darul, Bahaudin;
10. Teman-teman Kampus FH Unej : Darul, Diana, Setyo Utomo, Martin Pandu H. Ucil, Ludby, Rofik, Sandaya, Ferry, Rio, Nandu;
11. Special thank's to Bia yang telah dengan ikhlas memberikan cinta dan kasih sayangnya yang membuat penulis bersemangat belajar dan menyelesaikan skripsi ini demi mewujudkan mimpi, cita-cita, dan harapan penulis;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 26 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bersifat rahasia. Partai Politik merupakan suatu wadah dan sarana untuk menyatakan bebebaskan berpendapat akan tetapi kebebasan berpendapat itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga peruntukannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dapat kita lihat perjalanan sistem ketatanegaraan kita yang berawal dari pemilihan umum untuk pertama kali pada tahun 1955 sebagai bukti bahwa pada tahun tersebut kita sudah menerapkan demokrasi, meskipun dengan jumlah partai sedikit waktu itu. Dan kemudian berkembang menjadi banyak partai dan sampai sekarang kita banyak partai yang bermunculan sehingga untuk memeriahkan pesta demokrasi Sistem presidensiil di Indonesia telah mengalami purifikasi sejak amandemen UUD 1945 (2000-2002). Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah laboratorium politik pertama. Kini untuk kali kedua, SBY juga tampil sebagai Presiden di atas sistem presidensiil. Diakui, sistem stabilitas dan tata kelola dan efektivitas sosial ekonomi pemerintah menuju tatanan demokratis erat berkaitan dengan sistem yang dipakai. Benarkah demikian jika dikontekskan dengan Indonesia mengingat negeri ini sudah dua kali menggunakan sistem presidensiil yang ditopang dengan multi partai. Berdasar itu maka dapat diambil suatu permasalahan :

1. Bagaimana bentuk keterkaitan sistem presidensiil dengan sistem multipartai di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi penyederhanaan partai politik kaitannya dengan jaminan hak Konstitusional warga Negara?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Sistem Presidensiil dengan sistem Multipartai sudah sangat lama terkait satu sama lain. Dewasa ini perkembangan yang sangat dinamis terjadi di dalam sistem katatanegaraan Indonesia yaitu adanya partai-partai peserta pemilu yang berkoalisi dengan partai pemenang pemilu hanya untuk dapat menempatkan anggotanya ke dalam jajaran menteri di dalam kabinet pemerintahan. Hal ini dapat membuat partai koalisi semakin besar dan dinilai memang benar-benar pendukung pemerintahan. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa akhir-akhir ini partai-partai koalisi itu pecah dan tidak diragukan perpecahan itu membawa dampak bagi jalannya roda pemerintahan dalam hal presiden mengambil suatu kebijakan. Banyak sekali kebijakan yang ditentang oleh para anggota partai koalisi di parlemen itu membuktikan bahwa koalisi hanya bermain-main saja. Dalam substansi diatas bahwa nampak bentuk jalannya pemerintahan kita yaitu semenjak dalam rezim SBY sudah menggunakan presidensiil dengan multipartai.

Implikasi dari penyederhanaan partai terhadap kaitannya dengan hak Konstitusional Warga Negara adalah ketika partai-partai itu di sederhanakan maka yang terjadi adalah pembatasan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama di mata hukum dan bebas untuk berserikat dan menyatakan pendapat sebagai rangkaian dalam berdemokrasi, akan tetapi hal ini yang dianggap sebagai penyadaraan hak-hak konstitutisonal warga negara tidak mengapa dilaksanakan karena tidaklah cocok sistem presidennsiil itu diterapkan menggunakan multi partai yang ada hanyalah akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Tipe Penelitian	4
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3.3. Bahan Non-Hukum	6
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Demokrasi.....	8
2.1.1 Pengertian Konsep Demokrasi	
2.1.2 Konsep Demokrasi di Indonesia.....	
2.2. Partai Politik	18
2.2.1. Pengertian Partai Politik.....	18
2.2.2. Yujuan Partai Politik	20
2.2.3. Fungsi Partai Politik	21
2.3. Sistem Pemerintahan	23
2.3.1. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	23
2.3.2. Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensiil	25
2.3.3. Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer	29
2.4. Hak-hak Konstitusional Warga Negara.....	31
2.5. Sistem Multipartai	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Keterkaitan sistem Pemerintahan dengan sistem Multi Partai di Indonesia.....	34
3.1.1 Pengaruh Multipartai dalam Stabilitas Sistem Pemerintahan.	35
3.2. Implikasi Penyederhanaan Partai Politik terhadap Hak Konstitusional Warga Negara	37
3.2.1. Penyederhanaan Partai Politik dalam Pemilu.....	37
3.2.2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.....	40
BAB 4 PENUTUP.....	43
4.1. Kesimpulan.....	43
4.2. Saran-saran	43